

- Asshidiqie, Jimly . 2006. Perihal Undang – Undang di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sejarah Berdirinya Badan Pembinaan Hukum Nasional, bphn.go.id, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.
- C.J.M. ars. Schuyt dalam Rahardjo, Satjipto. 2012. Hukum Dan Masyarakat (Bandung: Angkasa).
- Darmodiharjo, Darji. dan Shidarta 2008. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Fuady, Munir. 2013. Teori-Teori Besar dalam Hukum, (Jakarta: Kencana)
- H.M Laica Marzuki. 2005. Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Jakarta: Konpress.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),
- Halim, Hamzah, 2009. Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian teoritis & Praktis (Disertasi Manual Konsepsi Teoritis Manuju Artikulasi Empiris), (Jakarta: Kencana Prenada Media)
- Hoesein Zainal Arifin, 2009. Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Hoesein, Zainal Arifin . 2009. Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Hoesein, Zainal Arifin. 2009. Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Huda, Ni'matul, 2005. Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta : UII Press)
- Maria Farida, 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius).
- Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni,.
- Iza Rumesten, RS. 2009. Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah, (Palembang: Aulia Cendikia Press)
- Kamil, Ahmad dan M.Fauzan. 2004. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta: Kencana).
- Lotulung, Paulus Effendi. 2000. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil

(Judicial Review), (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, 2000).

Lubis, M. Solly. 2011. Serba-Serbi Politik Hukum Edisi 2, (Jakarta: Sofmedia).

Malian Sobirin, 2001. Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, (Yogyakarta : FH UII Press, 2001

Marbun, SF dan MD, Mahfud. 2006. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty).

Nalle, Victor Imanuel W. . 2013. Konsep Uji Materiil: Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia, (Malang: Setara Press).

Nazir, Mohammad, 2003. Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Notonagoro, 2006. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia) dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara Cetakan Keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh)

Rahardjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).

Seidmen, Ann dkk. 2002. Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, (Jakarta: Elips)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Suteki dan Taufani, Galang. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers).

Syaukani, Imam. 2007 Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Assyidiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007).

Jurnal

Amalia, Luky Sandra. 2011. PERATURAN DAERAH BERMASALAH, Jakarta: Ombak bekerjasama dengan The Habibie Center, EDISI XXXVII / NO.1 /

Andryan, 2018. “Judicial Review Non Litigasi Dalam Perspektif Negara Hukum,” Buletin Konstitusi, Edisi 002,

Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Program Legislasi Nasional, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1, (Jakarta: Kemenkumham, 2005).

- Dirkareshza, Rianda. 2019. Kompetensi DPD RI dalam Mengemban Amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai Lembaga Tinggi Negara, *Jurnal Yuridis*, Desember 2019, Vol. 6, No. 2.
- Falaakh, M.Fajrul. 2001. dalam “Skema Constitutional Review di Indonesia: Tinjauan Kritis”, *Jurnal Mimbar Hukum* No.38/I.
- Setiadi, Wicipto. 2018. Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 7, No. 3 Desember.
- Siddiq, Armia Muhammad. 2016. Eksekutif Review Terhadap Perda di Daerah Otonomi Khusus, *Jurnal Rechtvinding*, 15 Agustus 2016, Volume 5, Nomor 2.
- Simatupang, Taufik H. . 2019. Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 2 Juni.
- Sururi, Ahmad. 2017. Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum yang Terintegrasi dan Harmonis, *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No. 2 Desember.
- Syahlan, Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, Desember 2019, Vol 25, No.1.
- Syahlan. 2011. Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, Desember 2019, Vol 25, No.1.
- Taufik H. Simatupang, Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 13 Juni 2019, Volume 19.

Sumber Online

- Bappenas, Strategi Refirmasi Regulasi Nasional, https://www.bappenas.go.id/files/9814/4419/3082/Buku_Reformasi_Regulasi.pdf, hal. 5-6.
- Effective And Sustainable Regulatory Reform: The Regulatory Guillotine in Three Transition and Developing Countries, Jacobs and Associate, 2006 (versi awal dari draf ini dipresentasikan di World Bank Conference: Reforming the Business Environment, Cairo 2005).
- Haryo Aswicahyo, dkk., “Perjalanan reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016”, diakses melalui <https://>

www.csis.or.id/uploaded_file/publications/perjalanan_reformasi_ekonomi_indonesia_1997-2016.pdf, pada 27 Agustus 2020.

Jokowi Prabowo Ingin Selesaikan Masalah Regulasi Dengan Rregulasi, <https://tirto.id/jokowiprabowo-ingin-selesaikan-masalah-regulasi-dengan-regulasi-deEM>, diakses tanggal 26 Oktober 2020

Khopiatuziadah, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Dalam Penyusunan Naskah Akademik, Jurnal Rechts Vinding Online.

Penataan Kelembagaan Untuk Mendorong Reformasi Regulasi Di Indonesia, <https://pshk.or.id/aktivitas/penataan-kelembagaan-untuk-mendorong-reformasi-regulasi-di-indonesia/>, diakses tanggal 11 Februari 2019.

Simak penjelasan BPHN yang diakses di <https://bphn.go.id/news/2016041104071626/ALUR-KERJA-ANALISIS-DAN-EVALUASI-HUKUM-NASIONAL>, diakses pada 27 September 2020.

The Global Indicators of Regulatory Governance (sebagaimana yang terpublikasi dalam www.rulemaking.worldbank.org per November 2018). Penilaian ini menyajikan pengukuran tentang aspek transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintah dalam siklus penyusunan peraturan.

